SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA

RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Ciganea-
JatiluhurTelp. (0264) 207908
sekretariatdprdkab.purwakarta@yahoo.com

KATA
PENGANTAR

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten purwakarta Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat DPRD, evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sampai dengan tahun 2023 dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026.

Tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Sekretariat DPRD.

PURWAKARTA 16 Juli 2024

Drs.H.SUHANDI.M.Si

NIP.19670413 198803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 4

1.3. Maksud Dan Tujuan..... 7

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 Dan Capaian Renstra SKPD..... 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 14

2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Sekretariat DPRD..... 16

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 17

2.5. Penelaahan Usulan Program..... 40

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 42

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 42

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD..... 43

3.3. Program Dan Kegiatan..... 46

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD 60

BAB V PENUTUP **66**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Capaian Kinerja Program Tahun 2023…….	8
Tabel 2.2	:	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2023 Kabupaten Purwakarta……..	9
Tabel 2.3	:	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta…….	15
Tabel 2.4	:	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta……	18
Tabel 3.1	:	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta ……..……....	45
Tabel 3.2	:	RumusanRencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta……..…….	51
Tabel 4.1	:	Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2025……..	61

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan peluang/kewenangan yang besar kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola pembangunan daerah secara mandiri dan demokratis. Dalam menghadapi tantangan tersebut, tentulah diperlukan suatu tindakan nyata dalam menyongsong kemajuan teknologi modern yang salah satunya dengan melalui perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah seperti halnya dipusat terbagi kedalam 3 (tiga) dokumen yaitu, 1) Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)untuk kurun waktu 20 tahun, 2) Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun dan 3) Perencanaan Tahunan Daerah (RKPD). Untuk tataran SKPD terdapat 2 (dua) dokumen perencanaan pembangunan yaitu, 1) Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD sebagai salah satu perangkat daerah sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang mengacu kepada Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah sebagai wujud dukungan terhadap program pembangunan daerah berlandaskan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan SKPD

untuk periode 1 (satu) tahun yang telah disempurnakan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai dokumen rencana tahunan SKPD. Renja Sekretariat DPRD kabupaten Purwakarta mempunyai arti yang strategis karena memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut.

a. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari penyempurnaan visi, misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
b. Renja tahun 2025 merupakan acuan SKPD untuk perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD
c. Renja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

a. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
b. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
c. Program dan kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang;
d. Program dan kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan Renstra Tahun 2024-2026;
d. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju

Rencana Kerja (Renja) tahun anggaran 2025 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 sampai dengan membuat rencana antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan berbagai aspek dan dinamika perkembangan lingkungan strategis yang diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2025.

Renja perangkat daerah memiliki keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota seperti yang gambar berikut:

Gambar 1.1

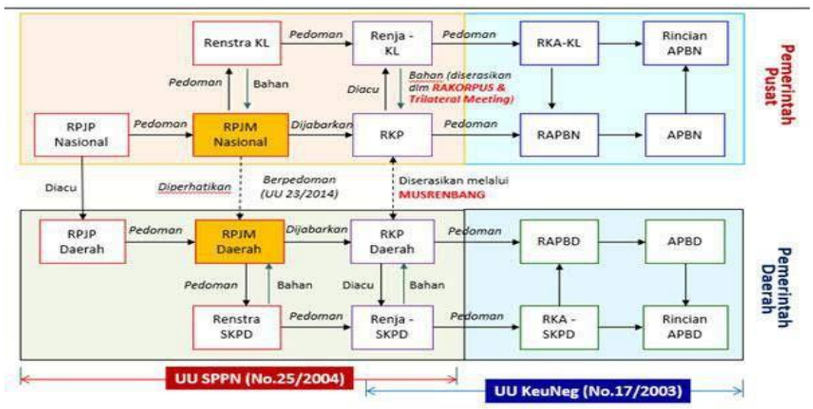

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024

Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
16. Peraturan Daerah Provinsi jawa Barat nomo 7 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan derah provinsi jawa barat No 9 tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi jawa barat tahun 2005 -2025

17. Peraturan Gubernur Provinsi jawa barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang rencana Pembangunan daerah (RPD) provinsi jawa barat tahun 2024-2026 (lembar derah

Provinsi jawa barat tahun 2023 Nomor 25)

18. Peraturan Gubernur Provinsi jawa barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang rencana Pembangunan daerah (RKPD) provinsi jawa barat tahun 2025 (lembar derah Provinsi jawa barat tahun 2024 Nomor 13)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 tahun 2006 tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan
20. Peraturan Gubernur jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi jawa barat Barat Tahun 2023-2026.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Penbangunan dan Pelaksanaan Musrenbag Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 16)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Barat merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan atau dasar dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewajibannya secara terarah, efisien, dan efektif, selain itu dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kegiatan kesekretariatan dan pelayanan DPRD, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2025 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD tahun 2025;
2. Sebagai rencana dalam memfasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
3. Sebagai sarana mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasipelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025;
4. Merupakan rencana dan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok danfungsi Sekretariat DPRD.

Adapun tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat DPRD di dalam menjalankan tugaspokok dan fungsinya mulai dari awal perencanaan;
2. Mewujudkan pelayanan tugas dan wewenang kedewanan yang aspiratif, transparan,akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuanpembangunan daerah dalam bentuk Rencana Kerja (Renja);
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang kedewanan;
5. Dasar untuk melaksanakan program-program dan kegiatan kedewanan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Barat tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan yang memuat:

1. BAB I : Pendahuluan

   Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan dan pentingnya kebijakan dan program pembangunan pada Sekretariat DPRD. Berdasarkan latar belakang ini kemudian ditetapkan maksud dan tujuan penyusunan kebijakan, landasan hukum, kemudian juga dijelaskan perihal hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

2. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

   Menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, menganalisis kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

3. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

   Berdasarkan peran dan kedudukan, tugas pokok dan fungsi maka disusun Tujuan, Sasaran Sekretariat DPRD yang diharapkan pada akhirnya akan mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi jawa barat sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

4. BAB IV : Rencana Kerja (Renja) dan PendanaanPerangkat Daerah

   Menjelaskan tentang program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD

dalam mendukung kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat

5. BAB V : Penutup

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2025 sepertiRenja tahun sebelumnya berpedoman kepada:

1. RPD Provinsi Jawa Barat Barat (bersifat indikatif)
2. Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai tolak ukur capaian kinerja dan evaluasi.

Renja sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebanyak 2 Program 15 Kegiatan dan 47 sub kegiatan, jumlah sub kegiatan tahun 2023 yang memenuhi target kinerja penyerapan anggaran sebesar 90-100% sebanyak 37 sub kegiatan. Faktor pendukung tercapainya target kinerja karena kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan terdapat Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja penyerapan anggaran sebesar 11 sub kegiatan yang memenuhi target kinerja penyerapan anggaran sebesar 70-80%, Faktor penghambat belum tercapainya target karena beberapa kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran terjadi perubahan kegiatan karena menyesuiakan dengan kebutuhan. Sementara itu terdapat 7 sub kegiatan dengan capian kegiatan di bawah 70% yang disebabkan oleh keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan prioritas kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta melaksanakan 2 (dua) program dan 15 (Lima Belas) kegiatan dan 47 sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, terdapat program/kegiatan yang melebihi targetkinerja, program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja dan program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.

Data hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta yang telah dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2023 dan sampai dengan tahun berjalan atau triwulan IV tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut

Tabel 2.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tajun 2023

No	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Realisasi APBD tahun lalu yang dievaluasi (2024)			Target Kinerja APBD tahun lalu yang dievaluasi (2024)		
			Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Nilai SAKIP Lingkup Sekretariat DPRD**	**86.285.403.531**	**82.695.320.132**		**100%**		
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD**	**228.914.800**	**214.599.636**	**93.75**	**100%**		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	81.289.800	74.488.260	91.63	**100%**		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	140.000.000	132.486.376	92.30	**100%**		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.625.000	7,625.000	100%	**100%**		
II	**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD**	**6.928.652.397**	**5.818.951.446**	**83.98**	**100%**		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.835.544..097	5.726.688.731	83.78	**100%**		

		(Orang/Bulan)				**100%**		
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	93.108.300	92.262.715	99.09	**100%**		
III	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD**	**557.810.000**	**448.958.224**	80.49	**100%**		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	172.810.000	71.500.000	41.40	**100%**		
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi peraturan perundang-undangan	300.000.000	-		**100%**		
3	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Formal	385.000.000	377.408.224	98.03	**100%**		
IV	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD**	**2.376.238.810**	**2.041.281.000**	85.90	**100%**		
1	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	413,036,300.00	49.856.000	98.53	**100%**		
2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya penyediaan peralatan tulis kantor, tersedianya peralatan perelengkapan kantor	329.365.700	298.475.000	90.62	**100%**		

3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	145.500.000	145.500.000	99.79	**100%**		
4	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya penyediaan makan dan minuman	1.850.772.310	1.547.750.000	83.63	**100%**		
5	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				**100%**		
V	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100%**		
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	-		**100%**		
2	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-		**100%**		
3	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	555.999.300	523.690.000	94.76	**100%**		
VI	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100%**		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12,000,000	12,000,000	100	**100%**		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	450,024,190	423,272,815	94.06	**100%**		
3	Penyediaan jasa pelayanan umu kantor	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umu kantor	2.996.445.404	2.447.640.836	81.68	**100%**		
VII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	1.226.845.000	1.190.249.146	'	**100%**		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	330.895.000	296.431.146		**100%**		

	Dinas Jabatan							
2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		345.950.000	345.260.000	99.80	**100%**		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	350.000.000	349.288.000	99.80	**100%**		

5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				**100%**		
VII	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Tepat Waktu**				**100%**		
1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	Rp35.859.477.671	35.310.089.544	98.47	**100%**		
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	Rp155.000.000	Rp-154.000.000	99.80	**100%**		
3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	Rp60,000,000	Rp59,850,000	99.75	**100%**		
VIII	**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Layanan Administrasi DPRD**	**739.411.000**	**715.941.630**	96.83	**100%**		
1	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD		Rp739.411.715.941	Rp715.941.630	96.83	**100%**		
II	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**Persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**				**100%**		
1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	Rp756,841,000	Rp695.374.056	91.94	**100%**		
2	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda (Dokumen)	Rp6,500,627,000	Rp6,408,394,140	98.58	**100%**		
3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	Rp245,880,000	Rp203.204,500	82.00	**100%**		
4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Rp509,224,000	Rp502,074,000	98.59	**100%**		

		(Dokumen)						
5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun (Dokumen)				**100%**		
1	Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp205.552.000	Rp-196.813.650	95.75	**100%**		
2	Pembahasan PerubahanKUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	Rp206.552.750	Rp-186.184.832	90.14	**100%**		
3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Laporan)	304.895.750	304.895.750	100	**100%**		
4	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD (Dokumen)	Rp218.671.250	Rp-136.440.709	62.40	**100%**		
5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	Rp326,013,000	Rp326,013,000	96.19	**100%**		
6	Pembahasan laporn semester	Pembahasan laporan semester	Rp422,581,000	400.000.000	95.65	**100%**		
III	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**					**100%**		
1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	Rp140,644,000	Rp102,113,000	72.84	**100%**		
2	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	Rp121,644,000	Rp87,926,000	72.08	**100%**		

3	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	Rp122,644,000	Rp83,285,000	68.06			

4	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	Rp117,644,000	Rp75.836.500	64.30	**100%**		
IV	**Peningkatan Kapasitas DPRD**					**100%**		
1	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen	Rp2.865.039.500	Rp2.732.931.000	95.39	**100%**		
2	Publikasi dan dokumentasi dewan	Jumlah dokumen publikasi dan dokumentasi	Rp1.078.806.000	Rp996,358,000	92.36	**100%**		
3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Rp495.816.000	Rp416,083,000	83.92	**100%**		
4	Orientasi DPRD	Jumlah orientasi DPRD		-		**100%**		
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah penyediaan tenaga ahli fraksi	Rp420.000.000	Rp420.000.000	100	**100%**		
V	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**					**100%**		
1	Pelaksanaan Reses	Jumlah pelaksanaan kegiatam reses	Rp7.287.551.000	Rp7.267.724.846	99.73	**100%**		
VIII	**Fasilitasi Tugas DPRD**					**100%**		
1	Koordinasi dan konsultasi pelaksanbaan tugas DPRD	Jumlah kegiatan Koordinasi dan konsultasi pelaksanbaan tugas DPRD	7.526.850.300	7.516.076.500	99.86	**100%**		
2	Pelaksanan tugas badan musyawarah	Jumlah kegiatan Pelaksanan tugas badan musyawarah	Rp1,248.607.000	Rp1.224.449.742	98.07	**100%**		
3	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah kegiatan Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Rp2.857.988.000	Rp2.830.439.000	99.04	**100%**		

dari tabel diatas diketahu bahwa terdapat 46 sub kegiatan yang emiliki penyerapan anggaran di bawah 70% mengingat sub kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lingkup kegiatan penunjang sehingga dalam pelaksanaannya selalu menyesuiakan dangan kebutuhan. Hal ini menunjukan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta pada tahun anggaran 2024 telah melakukan efesiensi terhadap anggaran melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan

Akan tetapi pada tahun anggaran 2024 di sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta terdapat beberapa Sub kegiatan ada yang belum mencapai target yang sudah di tentukan yaitu target 70 % ke atasa namun masih ada kegiatan yang mencapai target 60%, selain evaluasi dalam bentuk penyampaian anggaran dan realisasi fisik berbentuk outfut pada tahun 2024. maka perlu dicermati kembali Hasil Evaluasi pelaksanaan renja Tahun 2024 berdasarkan pada outcome setiap Program sesuia dengan Formulir Evaluasi pada Permendagri No 86 Tahun 2017

Tabel. TC.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	Unsur Pendukung									
402	Sekretariat DPRD									
40201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%							
	PROGRAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		100%							

			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana								
40201201	1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
4020120101	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	2 Dokumen	1 dokumen	2 Dokumen	1 dokumen	**100%**	2 Dokumen	1 dokumen	2 Dokumen
4020120103	1.2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
4020120105	1.3	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang tersusun					**100%**			
40201202	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN	50 orang/14 Bulan	50 orang/7 Bulan	50 orang/14 Bulan	50 orang/7 Bulan	**100%**	50 orang/14 Bulan	50 orang/7 Bulan	50 orang/14 Bulan
4020120201	2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	**100%**	1 laporan	1 laporan	1 laporan

4020120301	3.1	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**100%**			
4020120302	3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pengadaan pakian dinas beserta kelengkapannya	50 paket	50 paket	50 paket	50 paket	**100%**	50 paket	50 paket	50 paket
4020120303	3.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya pendidikan dan pelatihan	50 orang	30 orang	50 orang	30 orang	**100%**	50 orang	30 orang	50 orang
4020120306	3.4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50 orang	-	-	-	**100%**	50 orang	-	-
4020120308	3.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**100%**			
4020120311	3.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penyediaan komponen instalansi listrik	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	**100%**	1 paket	1 paket	1 paket
4020120310	3.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan tulis kantor	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	**100%**	1 paket	1 paket	1 paket
4020120312	3.8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	**100%**	1 paket	1 paket	1 paket

4020120313	3.9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya penyediaan barang cetakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	**100%**	1 paket	1 paket	1 paket
						1 paket	1 paket	**100%**			
4020120316	3.10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	**100%**	1 paket	1 paket	1 paket
4020120317	3.11	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**100%**			
4020120318	3.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						**100%**			
4020120322	3.13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya perlatan gedung kantor	20 unit	10 unit	20 unit	10 unit	**100%**	20 unit	10 unit	20 unit
4020120328	3.14	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**100%**			
4020120329	3.15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	**100%**	1 laporan	1 laporan	1 laporan
40201203	3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya asa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	**100%**	1 paket	1 paket	1 paket

30	6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrsi keuangan, dan kebersihan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	**100%**	1 laporan	1 laporan	1 laporan
4020120331	3.17	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**100%**			
		Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan, rutin berkala kendaran dinas operasional	2 paket	1 paket	2 paket	1 paket	**100%**	2 paket	1 paket	2 paket
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10 unit	8 unit	10 unit	8 unit	**100%**	10 unit	8 unit	10 unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20 unit	18 unit	20 unit	18 unit	**100%**	20 unit	18 unit	20 unit
								100%			

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	-	-	**100%**			

		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						**100%**			
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya gaji dan tunjangan DPRD	45 Orang 7 bulan	45 Orang 14 bulan	45 Orang 7 bulan	45 Orang 14 bulan	**100%**	45 Orang 7 bulan	45 Orang 14 bulan	45 Orang 7 bulan
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya pakaina dinas dan atribut	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	**100%**	2 paket	2 paket	2 paket
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya medical chek up DPRD	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	**100%**	50 orang	50 orang	50 orang
		Layanan Administrasi DPRD						**100%**			
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tersedianya fasilitasi rpat DPRD	1 laporan	2 laporan	1 laporan	2 laporan	**100%**	1 laporan	2 laporan	1 laporan
40202	**PROGRAM PELAYANAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**										
40202202	1	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**						**100%**			

4020220202	1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Tersedianya penyusunan pembahasan program	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	**100%**	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen
4020220203	1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	**100%**	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen

4020320101	1.1	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Tersedianya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	**100%**	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
4020320102	1.2	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	4 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	**100%**	4 dokumen	3 dokumen	4 dokumen
4020320104	1.3	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Teredianya penyusunan tata tertib	1 kegiatan	-	-	-	**100%**	1 kegiatan	-	-
40203202	2	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**						**100%**			
4020320201	2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen Pembahasan tentang Pembahasan KUA dan PPAS	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	**100%**	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 kegiatan				**100%**	1 kegiatan		
		pembahasan APBD	Jumlah dokumen pembahasan APBD	1 kegiatan				**100%**	1 kegiatan		

		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen APBD Perubahan	1 kegiatan				**100%**	1 kegiatan		
		Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen laporan semester	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	**100%**	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
		Pembahasan pertanggung jawaban APBD	Jumlah dokumen pembahasan pertanggung jawaban APBD	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	**100%**	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						**100%**			
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya pemerintah bidang pemerintahan hukum	4 laporan	1 laporan	4 laporan	1 laporan	**100%**	4 laporan	1 laporan	4 laporan
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	TerlaksananyaPengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	4 laporan	1 laporan	4 laporan	1 laporan	**100%**	4 laporan	1 laporan	4 laporan
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	TerlaksananyaPengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	4 laporan	1 laporan	4 laporan	1 laporan	**100%**	4 laporan	1 laporan	4 laporan
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	4 laporan	1 laporan	4 laporan	1 laporan	**100%**	4 laporan	1 laporan	4 laporan
		Peningkatan Kapasitas DPRD						**100%**			
		Orientasi DPRD	Terlaksananya kegiatan orientasi DPRD	1 kegiatan				**100%**	1 kegiatan		

		Pendalaman Tugas DPRD		3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	**100%**	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan		3 laporan	2 laporan	3 laporan	2 laporan	**100%**	3 laporan	2 laporan	3 laporan
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		7 orang/ 12 bulan	7 orang/ 7 bulan	7 orang/ 12 bulan	7 orang/ 7bulan	**100%**	7 orang/ 12 bulan	7 orang/ 7 bulan	7 orang/ 12 bulan
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		5 orang / 12 bulan	5 orang / 7 bulan	5 orang / 12 bulan	5 orang / 7 bulan	**100%**	5 orang / 12 bulan	5 orang / 7 bulan	5 orang / 12 bulan
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						**100%**			
		Pelaksanaan Reses	Terlaksananya kegiatan reses anggota	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	**100%**	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
		Penyusunan Kode Etik DPRD	Terlaksananya penyusunan kode etik	-	-	-	-	**100%**	-	-	-
		Fasilitasi Tugas DPRD						**100%**			
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksanaya kegiatan koordinasi dan konultasi DPRD	6 dokumen	4 dokumen	6 dokumen	4 dokumen	**100%**	6 dokumen	4 dokumen	6 dokumen
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya kegiatan Badan Musyawarah	6 dokumen	2 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	**100%**	6 dokumen	2 dokumen	6 dokumen

		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	**100%**	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen

2.1.1 Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024

Memperhatikan pelaksanaan rencana kerja sebagaimana tergambar dari realisasi Anggaran pada Program dan Kegiatan sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2024 Sejak Bulan Januari samapai dengan Desember 2023 dari 2 Program yang di tetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026 masih ada program ataupun kegiatan yang belum mencapai target,adapun kegiatan yang lainnya sudah mencapai target, 86.825.403.531 secara keseluruhan capaian atas program dan Kegiatan Terealisasi sebesar Rp. Dari total anggaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 50.695.320.152 Atau terelisasi 70.94%. ini berarti realisasi pencapaian target kinerja yang direncanakan masih belum mencapai target sebagaimana telah ditetapkan dalam renstra 2024-2026

2.1.2 Faktor - faktor penyebab tidak tercapaian target

Beberapa penyebab tidak tercapainya target atas pelaksanaanprogram/kegiatan, diantaranya adalah :

1. Tidak terlaksananya APBD Perubahan Tahun 2023
2. Efisieansi penggunaan anggaran dan hasil negoisasai melalui proses pengadaan barang dan jasa
3. Pelaksanaan kegiatan sekretariat DPRD dan fasilitasi yang dlaksanakansangat tergantung dengan agenda pimpinan dan anggota dewan hasil
4. Adanya pergeseran anggaran kegiatan di karenakan anggaran kegiatan yang masih kurang
5. Adanya saran pertimbangan yang di sepakati oleh badan musyawarah DPRD, sehingga dinamika kegiatan dewan yang sangat cepat dan dapat ditambah sering kali terjadi perubahan agenda kegiatan Dewan sewaktu waktu

6. Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia/pegawai terutama di jajaran para pelaksana yang berkompeten dan ahli dalam bidangnya termasuk masih lemah dan belum di pahaminya sistem pengelolaan keuangan oleh para pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK);
7. Pelaksanaan kegiatan yang sangat hati- hati dan masih adanya keraguan yang muncul dalam pengelolaan kegiatan
8. Mutasi pegawai dan pergatian pucuk kepemimpinan yang terjadi ditengan tengah tahun berjalan dan memunculkan persepsi kebijaka baru
9. Target capaian program/kegiatan yang ada dalam renstra masih kurang tepat dan perlu dilakukan perbaikan kedepannya. Seharusnya target yang di maksud dapAnalisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029, Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2008 mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsi sebagai fasilitator kesekretariatan kedewanan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan Kualitas Tata Kerja Sekretariat DPRD.Oleh karena itu, Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan kedewanan di lingkup Pemerintah Kabupaten purwakarta harus mampu menjadi institusi pelayananan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan

Dari tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang ingin diwujudkan sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD;

- Meningkatnya pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan;
- Meningkatnya akuntabilitas dan kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD.
- Adapun indikator dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
- Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti
- Nilai LAKIP
- Persentase BMD dalam Keadaan Baik.

2.2 Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut tahapan penetapan indikator kinerja dengan pengertian sebagai berikut:

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur Pelayanan dan Fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (bottom-up) maupun dari tingkat atas (top- down),

sehingga peran serta masyarakat (stakeholders) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun seluruh capaian kinerja yang diuraikan dalam capaian sasaran strategis dan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat diform sebagai berikut (T-C 30):

Tabel 2.3 (T-C.30)

Pencapaian kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta

No.	Indikator	satuan	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Perangkat daerah
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase pemenuhan referensi perundang-undangan	persen		100	100	100	75.00	100.00	82.05			Sekretariat DPRD
2	Persentase Fasilitasi kegiatan Rapat DPRD	persen		100	100	100	75.00	100.00	82.05			Sekretariat DPRD
3	Persentase Penyusunan Risalah Rapat	persen		100	100	100	75.00	100.00	82.05			Sekretariat DPRD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sampai dengan Tahun 2023, Sekretariat DPRD dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Terdapat kegiatan yang belum optimal realiasi capaian kinerjanya, dikarenakan adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang diakibatkan Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19.
2. Capaian kinerja lebih rendah daripada realisasi anggaran dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang sudah ada realisasi anggarannya namun kinerjanya belum tercapai penuh.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelaksanaan renja Tahun 2023, maka solusi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan secara optimal berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan alokasi anggaran dalam DPA dengan memperhatikan realisasi kinerja ditengah pandemi Covid- 19;

2. Mengalokasikan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan tepat pada DPA sesuai dengan skala prioritas, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat ditentukan isu-isu strategis, yaitu sebagai berikut:

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan serta peraturan perundangundangan secara nasional maupun regional yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, terutama kondisi kebijakan politik;

2. Reformasi birokrasi secara terus menerus membuka peluang bagi peningkatan profesionalisme aparat serta nilai-nilai demokratis, partisipatif, transparansi dan akuntabel. Terbukanya peluang pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, bimtek dan sejenisnya;

3. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menciptakan percepatan arus informasi yang tak terbatas ruang dan waktu. Memberikan peluang bagi masyarakat untuk menggunakan semua kebutuhan informasi yang di kehendaki. Akses program dan kegiatan di OPD bisa di ketahui oleh masyarakat, hal ini menunjukan akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan; dan

4. Masih belum tersedianya fasilitas informasi yang mudah diakses masyarakat dalam setiap aktivitas kinerja DPRD baik sebagai individu maupun lembaga.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2023, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu disebabkan karena adanya beberapa perubahan mengenai Peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini (TC-31) :

Tabel 2.4 (T-C.31)

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Sekretariat DPRD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lo-kasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lo-kasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
	SEKRETARIAT DPRD										
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Kab. purwakarta	**Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas**	**90 %**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Kab. purwakarta	**Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas**	**90 %**		
1.1	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. purwakarta			150.000.000	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. purwakarta	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu, 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu. 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	90 %		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. purwakarta	"Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah"	2 Dokumen	80.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. purwakarta	"Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah"	2 Dokumen	80.000.000	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. purwakarta	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"	14 Orang /Bulan	6.835.409.787	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Kab. purwakarta	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"	14 Orang/ Bulan	6.835.409.787	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD	Kab. purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Dokumen	147.347.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Dokume n	147.347.500	
1.4	**Administrasi kepegawaian Perangkat DAERAH**	Kab. purwakarta			1.015.652.000	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kab. purwakarta	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	90 %	1.015.652.000	
	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. purwakarta	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapnnya tersedianya pengadaan pakaian khusu hari hari tertentu	12 Bulan	329.000.000	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. purwakarta	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapnnya tersedianya pengadaan pakaian khusu hari hari tertentu	12 Bulan	329.000.000	
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab. purwakarta	Tersedianya sosiaslisasi peraturan perundang-undangan		300.000.000					300.000.000	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Kab. purwakarta	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	100%	386.652.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Kab. purwakarta	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	100%	386.652.000	

1.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. purwakarta			2.534.567.557		Kab. purwakarta			2.534.567.557	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kab. purwakarta	Tersedianya penyediaan komponen/instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	192.770.457	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kab. purwakarta	Tersedianya penyediaan komponen/instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	192.770.457	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. purwakarta	Tersedianya penyediaan alat tulis kantor, tersedianya peralatan dan perlengakpan kantor	12 dok	612.984.600	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. purwakarta	Tersedianya penyediaan alat tulis kantor, tersedianya peralatan dan perlengakpan kantor	12 dok	612.984.600	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. purwakarta	Tersedianya penyediaan makanan dan minuman	12dok	1.472.312.5000	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. purwakarta	Tersedianya penyediaan makanan dan minuman	12dok	1.472.312.5000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. purwakarta		12 dok	136.500.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. purwakarta		12 dok	136.500.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. purwakarta	Tersedianya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 dok	120.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. purwakarta	Tersedianya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 dok	120.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. purwakarta			1.523.296.200		Kab. purwakarta			1.523.296.200	
	Pengadaan Mebel	Kab. purwakarta	Tersedianya fasilitasi kantor	2 paket	150.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. purwakarta	Tersedianya fasilitasi kantor	2 paket	150.000.000	
	Pengadaan kendaraan dinas operasional lapangan		Tersedianya Pengadaan kendaraan dinas operasional lapangan	40 unit	250.000.000					250.000.000	

	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Kab. purwakarta	Tersedianya sarana gedung kantor		350.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Kab. purwakarta	Tersedianya sarana gedung kantor		350.000.000	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. purwakarta	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	12 bulan	773.296.200	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. purwakarta	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	12 bulan	773.296.200	
	Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. purwakarta					Kab. purwakarta				
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. purwakarta	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	6000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. purwakarta	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	6000.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. purwakarta	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	12 bulan	400.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. purwakarta	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	12 bulan	400.000.000	
	Penyedian jasa pelayanan umum kantor	Kab. purwakarta	Tersedianya jasa administrasi keuangan, tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	2.390.455.304.	Penyedian jasa pelayanan umum kantor	Kab. purwakarta	Tersedianya jasa administrasi keuangan, tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	2.390.455.304.	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. purwakarta			1.317.000.000		Kab. purwakarta			1.317.000.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. purwakarta	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dina/ operasional , tersedianya jasa pemeliharaan dinas perizinan kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	367.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. purwakarta	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dina/ operasional , tersedianya jasa pemeliharaan dinas perizinan kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	367.000.000	

	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. purwakarta	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala perlengakpan gedung kantor	12 bulan	450.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. purwakarta	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala perlengakpan gedung kantor	12 bulan	450.000.000	
	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. purwakarta	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor, terlaksananya pengadaan dan pemeliharan sarana dan prasarana kantor DPRD	12 bulan	500.000.000	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. purwakarta	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor, terlaksananya pengadaan dan pemeliharan sarana dan prasarana kantor DPRD	12 bulan	500.000.000	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. purwakarta			36.079.477.671		Kab. purwakarta			36.079.477.671	
	Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD	Kab. purwakarta	Tersedianya gaji dan Tunjangan DPRD	14 bulan	35.859.477.671	Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD	Kab. purwakarta	Tersedianya gaji dan Tunjangan DPRD	14 bulan	35.859.477.671	
	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Kab. purwakarta	Teralaksananya Pakaian Dinas dan atribut DPRD	100%	120.000.000	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Kab. purwakarta	Teralaksananya Pakaian Dinas dan atribut DPRD	100%	120.000.000	
	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Kab. purwakarta	Terlaksananya medicl Chek Up DPRD	45 orang	100.000.000	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Kab. purwakarta	Terlaksananya medicl Chek Up DPRD	45orang	100.000.000	
	Layana Administrasi DPRD	Kab. purwakarta			700.000.000		Kab. purwakarta			700.000.000	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. purwak	Tersedianya Fasilitasi Rapat DPRD	12 bulan		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. purwakart	Tersedianya Fasilitasi Rapat DPRD	12 bulan		

		arta					a				
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kab. purwakarta	Persentase pemenuhan referensi perundang-undangan, persentase fasilitasi kegiatan rapat DPRD				Kab. purwakarta				
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. purwakarta			4.200.000.000		Kab. purwakarta			4.200.000.000	
	Penyusunan dan Pembahasan program pembentukan daerah	Kab. purwakarta	Tersedianya penyusunan dan pembahasan program dan pembentukan peraturan daerah tersedianya rapat rapat DPRD		600.000.000	Penyusunan dan Pembahasan program pembentukan daerah	Kab. purwakarta	Tersedianya penyusunan dan pembahasan program dan pembentukan peraturan daerah tersedianya rapat rapat DPRD		600.000.000	
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Kab. purwakarta	Tersedianya pembahasan rancangan perda		3.000.000.000	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Kab. purwakarta	Tersedianya pembahasan rancangan perda		3.000.000.000	
	Penyelengaraan kajian perundang-undangan	Kab. purwakarta	Tersedianya Penyelengaraan kajian perundang-undangan		200.000.000	Penyelengaraan kajian perundang-undangan	Kab. purwakarta	Tersedianya Penyelengaraan kajian perundang-undangan		200.000.000	
	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan naskah akademik	Kab. purwakarta	Tersedianya Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan naskah akademik		400.000.000	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan naskah akademik	Kab. purwakarta	Tersedianya Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan naskah akademik		400.000.000	
	Pembahasan kebijakan anggaran	Kab. purwakarta	**Tersedianya Pembahasan kebijakan anggaran**		2.480.000.000		Kab. purwakarta			2.480.000.000	

	Pemabahasan KUA dan PPAS	Kab. purwakarta	Terlaksananya Pemabahasan KUA dan PPAS		400.000.000	Pemabahasan KUA dan PPAS	Kab. purwakarta	Terlaksananya Pemabahasan KUA dan PPAS		400.000.000	
	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Kab. purwakarta	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS		400.000.000	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Kab. purwakarta	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS		400.000.000	
	Pembahasan APBD	Kab. purwakarta	Terlaksananya Pembahasan APBD		400.000.000	Pembahasan APBD	Kab. purwakarta	Terlaksananya Pembahasan APBD		400.000.000	
	Pembahasan APBD Perubahan	Kab. purwakarta	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan		400.000.000	Pembahasan APBD Perubahan	Kab. purwakarta	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan		400.000.000	
	Pembahasan laporan semester	Kab. purwakarta	Terlaksananya Pembahasan laporan semester		450.000.000	Pembahasan laporan semester	Kab. purwakarta	Terlaksananya Pembahasan laporan semester		450.000.000	
	Pemabahasan pertangung jawaban APBD	Kab. purwakarta	Terlaksananya Pemabahasan pertangung jawaban APBD		430.000.000	Pemabahasan pertangung jawaban APBD	Kab. purwakarta	Terlaksananya Pemabahasan pertangung jawaban APBD		430.000.000	
	Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan	Kab. purwakarta			484.000.000		Kab. purwakarta				
	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Kab. purwakarta	Tersedianya Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum		121.000.000	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Kab. purwakarta	Tersedianya Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum		121.000.000	

	Pengawasan urusan pemerintahan bidang infarstuktur	Kab. purwakarta	Tersedianya Pengawasan urusan pemerintahan bidang infarstuktur		121.000.000	Pengawasan urusan pemerintahan bidang infarstuktur	Kab. purwakarta	Tersedianya Pengawasan urusan pemerintahan bidang infarstuktur		121.000.000	
	Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Kab. purwakarta	Tersedianya Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat		121.000.000	Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Kab. purwakarta	Tersedianya Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat		121.000.000	
	Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Kab. purwakarta	Tersedianya Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian		121.000.000	Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Kab. purwakarta	Tersedianya Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian		121.000.000	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. purwakarta			4.700.000.000		Kab. purwakarta				
	Pendalaman tugas DPRD	Kab. purwakarta	Terlaksananya Pendalaman tugas DPRD		3.000.000.000	Pendalaman tugas DPRD	Kab. purwakarta	Terlaksananya Pendalaman tugas DPRD		3.000.000.000	
	Publikasi dan dokumentasi dewan	Kab. purwakarta	Terlaksananya Publikasi dan dokumentasi dewan		1000.000.000	Publikasi dan dokumentasi dewan	Kab. purwakarta	Terlaksananya Publikasi dan dokumentasi dewan		1000.000.000	
	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Kab. purwakarta	Terlaksananya Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli		400.000.000	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Kab. purwakarta	Terlaksananya Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli		400.000.000	
	Peneydiaan tenaga ahli fraksi	Kab. purwak	Terlaksananya Peneydiaan tenaga ahli fraksi		300.000.000	Peneydiaan tenaga ahli fraksi	Kab. purwakart	Terlaksananya Peneydiaan tenaga ahli fraksi		300.000.000	

		arta					a				
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. purwakarta			6000.000.000	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Kab. purwakarta			6000.000.000	
	Pelaksanaan Reses	Kab. purwakarta	Tersedianya pelaksanaan reses anggota DPRD		6000.000.000	Pelaksanaan Reses	Kab. purwakarta	Tersedianya pelaksanaan reses anggota DPRD		6000.000.000	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. purwakarta			4.846.717.355	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. purwakarta			4.846.717.355	
	Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. purwakarta	Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD		3000.000.000	Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. purwakarta	Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD		3000.000.000	
	Fasilitasi pelaksanan tugas badan Musyawarah	Kab. purwakarta	Tersedianya Fasilitasi pelaksanan tugas badan Musyawarah		1000.000.000	Fasilitasi pelaksanan tugas badan Musyawarah	Kab. purwakarta	Tersedianya Fasilitasi pelaksanan tugas badan Musyawarah		1000.000.000	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. purwakarta	Tersedianya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		846.717.355	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. purwakarta	Tersedianya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		846.717.355	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep,

merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip- prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar- benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan/Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum PD serta Musrenbang Tingkat Kota/Kabupaten. Pada tahap Forum PD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing PD terkait.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu–isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Renja PD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum PD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program

dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanan dan optimalisasi

pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Pada tahun 2023 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan atau dari masyarakat Kabupaten Purwakarta untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta

No	Usulan Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran
	NIHIL NIHIL	

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Besaran/ Volume
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	**Nilai evaluasi SAKIP dari APIP**	**A**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat**	**85**	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten**	**BB**	**70.000.000**
				Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	50.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	20.000.000
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Terlaksananya**	**100%**	**6.735.544.529**

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Besaran/ Volume
1	2	3	4	5	6	7	8
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang/bulan	6.685.544.529
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan triwulanan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dok	50.000.000
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**750.000.000**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 bulan	200.000.000-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 orang	300.000.000
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundangundangan	100 orang	300.000.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**100%**	**2.261.760.000**

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Besaran/ Volume
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	100.000.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan	12 dokumen	250.000.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 dokumen	1.691.760.000
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		100.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		120.000.000
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik**	**100%**	

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Besaran/ Volume
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan perlatan dan mesin lainnya		500.000.000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 unit	750.000.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor**	**100%**	**4.931.062.904**
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	450.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	4.469.062.904
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta gedung bangunan yang terpelihara**	**100%**	**1.445.900.000**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	295.900.000

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Besaran/ Volume
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	50.000.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	300.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	500.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	256 Unit	500.000.000
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Persentase Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**100%**	**39.625.000.000**
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 orang/bulan	39.150.000.000
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 paket	375.000.000
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 orang	100.000.000

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Besaran/ Volume
1	2	3	4	5	6	7	8
				Layanan Administrasi DPRD	**Persentase Terlaksananya layanan administrasi DPRD**	**100%**	**1.044.192.754**
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	3 laporan	500.000.000
	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase perda yang ditetapkan tepat waktu**	**100%**	**15.850.389.504**
					Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu	**6 Dok**	
					Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti	**100%**	
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan**	**8 dok Perda**	**7.087.611.000**
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8 dokumen	1.200.000.000

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Besaran/ Volume
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 dokumen	9.500.000.000
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	8 dokumen	200.000.000
				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8 dokumen	1.050.000.000
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan anggaran**	**5 rekomendasi**	**573.757.000**
				Pembahasan laporan semester	Jumlah dokumen pembahasan laporan semester	1 dokumen	400.000.000
				Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	400.000.000
				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	400.000.000
				Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	400.000.000
				Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	400.000.000
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	400.000.000

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Besaran/ Volume
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Rekomendasi Pengawasan penyelenggaran pemerintah yang ditindaklanjuti**	**15 laporan**	**400.000.000**
				Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 laporan	100.000.000
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 laporan	100.000.000
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 laporan	100.000.000
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 laporan	100.000.000

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Besaran/ Volume
1	2	3	4	5	6	7	8
				Peningkatan Kapasitas DPRD	**Terwujudnya fasilitasi dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal**	**100%**	**3.475.000.000**
				Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	2000.000.000
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	8 dokumen	500.000.000
				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 orang	525.000.000
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	450.000.000

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Besaran/ Volume
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Dok laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah**	**92 Dok**	**1.762.251.800**
				Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	4.500.000.000
				Fasilitasi Tugas DPRD	**Dok laporan fasilitasi tugas DPRD**	**35 Dok**	**1.955.711.200**
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8 dokumen	8000.000.000
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6 Dok	1.531.452.216
				Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	6 Dok	2.700.000.000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional yang tercantum dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan (RPJPN) 2025-2045 adalah penguatan pondasi transformasi

Tujuan pembangunan jangka menengah nasional dalam RPJMN 2025-2029 Yng di selaraskan dengan tujuan pembangunan jangka panjang nasional yaitu dituangkan dalam upaya dalam visi dan 8 misi (agenda) jangka panjang pembangunan 2025.

Visi indonesia emas 2045
"NEGARA NUSANTARA BERDAULAT,MAJU DAN BERKELANJUTAN'

8 Misi (agenda pembangunan 2025 – 2045)

1. Transformasi sosial
2. Transformasi ekonomi
3. Transformasi tata kelola
4. Supremasi hukum,stabilitas dan ketanguhan diplomasi
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
6. Pembangunan kewilayahan yang rata dan berkeadilan
7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Kesinambungan pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daearah pada rencana pembangunan daerah (RPD) provinsi jawa barat tahun2024 -2026 diarahkan untuk mewujudakan visi RPJPD tahun 2005 – 2025 yaitu dengan iman dan taqwa,provinsi jawa barat termaju di indonesia,sasaran pembangunan jawa barat tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
3. Terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah yang di dukung inprastruktur berkualitas dan lingkungan yang berkelajutan.

Pada penyusunan renja mengacu pada RKPD Kabupaten Purwakarta untuk tahun 2025, Tema pembangunan,isu strategis dan prioitas pembangunan daerah kabupaten purwakarta taun 2025 adalah sebagai beerikut :

Tema pembangunan kabupatean purwakarta tahun 2025

PENGUATAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL

Prioritas pembangunan daerah kabupaten purwakrta tahun 2025

1. Peningkatan kulitas SDM dan pemajuan kebudayaan
2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan KB
3. Pengelolan lingkungan hidup dan ketahan bencana
4. Pengembangan koprasi dan UMKM
5. Peningkatan nilai investasi, usaha industri dan perdagangan.

Peraturan bupati kabupaten purwakarta nomber 27 tahun 2023 tentang kedudukan,susunan,organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 80 Tahun 2019 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPR

Kabupaten Purwakarta mempunyai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang memiliki peran penting untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purwakarta.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;

4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
5. Pelaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang berjalan dengan baik akan berdampak pada perwujudan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta.

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi Mewujudukan Purwakarta Istimewa dan misi Kabupaten Purwakarta . Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purwakarta, Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta menentukan tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD. Pada RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029, Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan Misi ke-5 (lima), yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Adapun Tujuan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta sesuai dengan misi Kabupaten Purwakarta tersebut adalah “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif”.

Dengan tujuan tersebut Sekretariat DPRD diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Purwakarta dalam

melaksanakan tri fungsi DPRD yaitu Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Berdasarkan tujuan strategis tersebut di atas, maka sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintah umum yang baik dan Efektif

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

Mengacu kepada Visi sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai penjabaran dari setiap Misi dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 maka perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk satu tahun.

Dalam mewujudkan Misi yang diinginkan, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu, "Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dan meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta "

3.1.1 **Tujuan**

Rencana kerja sekretariat DPRD tahun 2025 disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta untuk Tahun 2025 agar dalam pelaksanaan Tugas dan wewenang DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kerja yang sudah di tetapkan

3.1.2 **Sasaran**

Sesuai dengan peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomber 27 tahun 2023 tentang kedudukan,susunan,organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas, Fungsi dan Wewenang dan DPRD Kabupaten Purwakarta harus dapat mewujudkan peningkatan kualitas dukungan administrasi, sarana dan prasarana, keuangan, persidangan dan perundang-undangan , penyerapan aspirasi dan perumusan kebijakan dan kehumasan

Dalam rangka peningkatan fungsi fasilitasi tersebut, sekretariat DPRD berupaya meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program dan kegiatan-kegiatan dilingkungan sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Tugas-Tugas DPRD Purwakarta

Sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan Fungsi nya adalah terwujudnya kinerja sekretariat DPRD dalam mendukung penyelesaian agenda DPRD

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta

Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Kinerja Sasaran**
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan efektif	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum baik dan Efektif	Capaian Sakip PD Persentase Fasilitasi Kegiatan Rapat DPRD
		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran
		Persentase Penyusunan Risalah Rapat
		Persentase Referensi Perundang-Undangan

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah istrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harusdilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta, maka pada Tahun 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta melaksanakan 2 program, 15 kegiatan dan 67 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 76.391.422.024,- dengan rincian sebagai berikut: program/kegiatan penunjang urusan Pemerintah/kota Rp.48.879.578.724 dan Prpgram/Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Rp 27.511.843.300

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah

- ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi Kinerja SKPD

B. Administrasi Keuangan

- ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- ✓ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya
- ✓ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- ✓ Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- ✓ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- ✓ Penyelenggarann Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- ✓ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
- ✓ Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor
- ✓ Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- ✓ Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan jabatan
- ✓ Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya
- ✓ Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

E. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- ✓ Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- ✓ Penyediaan Pakaian dinas dan atribut DPRD
- ✓ Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

F. Layanan Administrasi DPRD

- ✓ Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ✓ Program dukungan Pelaksanaan dan Fungsi DPRD
- ✓ Pembentukan peraturan daerah dan DPRD
- ✓ Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- ✓ Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- ✓ Penyelenggaran kajian Perundang- Undangan
- ✓ Pasilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik
- ✓ Pembahasan Kebijakan Anggaran
- ✓ Pembahasan KUA dan PPAS
- ✓ Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- ✓ Pembahasan APBD Perubahan
- ✓ Pembahasan Laporan Semester
- ✓ Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD
- ✓ Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
- ✓ Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
- ✓ Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastuktur
- ✓ Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

- ✓ Pengawasan Urusan pemerintahan Bidang Perekonomian

G. Peningkatan Kapasitas DPRD

- ✓ Pendalaman Tugas DPRD
- ✓ Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- ✓ Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

H. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- ✓ Pelaksanaan Reses

I. Fasiltasi Tugas DPRD

- ✓ Koordiansi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- ✓ Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
- ✓ Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Tabel Tabel 3.2 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan kegiatan tahun 2024 dan perkiraan maju Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								
4	02				**SEKRETARIAT DPRD**								
4	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		Kab. Purwakarta			PAD		90 %	
4	02	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu, 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu. 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Purwakarta	90 %		PAD		90 %	70.000.000
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	"Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah"	Kab. Purwakarta	2 Dokumen	186.610.000	PAD		2 Dokumen	50.000.000
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Purwakarta	12 Dokumen	17.715.400	PAD		12 Dokumen	20.000.000

4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Kab. Purwakarta	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen	20.000.000
4	02	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kab. Purwakarta	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen	6.735.544.529
4	02	02	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Purwakarta	1 Dokumen	Rp 6.685.544.529	PAD		1 Dokumen	6.685.544.529
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/tiwulan/semesteran SKPD		Kab. Purwakarta	1 Laporan	Rp 90.950.700	PAD		1 Laporan	50.000.000
4	02	01	2.01	07	**Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**		Kab. Purwakarta	1 Laporan		PAD		1 Laporan	750.000.000
4	02	01	2.02		Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Kab. Purwakarta	90 %	Rp 288.200.000	PAD		90 %	200.000.000

4	02	01	2.02	01	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi		Kab. Purwakarta	25 Orang/ Bulan	Rp 740.800.000	PAD		25 Orang/Bulan	300.000.000
4	02	01	2.02	03	Administrasi Umum Perangkat Daerah					PAD			2.261.760.00
4	02	01	2.02	05	Penyediaan Komponen instalansi listrik/peenerangan Bangunan Kantor		Kab. Purwakarta	1 Laporan	Rp 100.000.000	PAD		1 Laporan	100.000.000
4	02	01	2.02	06	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Purwakarta	1 Dokumen	*Rp 300.152.000*	PAD		1 Dokumen	250.000.000
4	02	01	2.02	07	Penyediaan bahan logistik kantor		Kab. Purwakarta	2 Dokumen	Rp 1.691.760.000	PAD		2 Dokumen	1.691.760.000
4	02	01	2.02	08	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kab. Purwakarta	1 Dokumen	Rp 87.750.000	PAD		1 Dokumen	100.000.000
4	02	01	2.03		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Purwakarta	90 %	Rp 120.000.000	PAD		90 %	120.000.000

4	02	01	2.03	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kab. Purwakarta	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen	1.250.000.000
4	02	01	2.03	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Purwakarta	2 Dokumen		PAD		2 Dokumen	
4	02	01	2.03	03	Pengadaan Mebel		Kab. Purwakarta	2 Laporan		PAD		2 Laporan	
4	02	01	2.03	04	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Purwakarta	1 Laporan	Rp 610.859.000	PAD		1 Laporan	500.000.000
4	02	01	2.03	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Purwakarta	20 Dokumen		PAD		20 Dokumen	
4	02	01	2.03	06	Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah		Kab. Purwakarta	2 Laporan		PAD		2 Laporan	4.931.062.904
4	02	01	2.05		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Purwakarta	90 %	Rp 12.000.000	PAD		90 %	12.000.000
4	02	01	2.05	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Purwakarta	1 Paket	Rp 411.748.000	PAD		1 Paket	450.000.000

4	02	01	2.05	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Purwakarta	12 Dokumen	Rp 4.469.062.904	PAD		12 Dokumen	4.469.062.904
4	02	01	2.05	09	Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah		Kab. Purwakarta	25 Orang		PAD		25 Orang	1.445.900.000
4	02	01	2.05	10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kab. Purwakarta	50 Orang	Rp 295.897.200	PAD		50 Orang	295.900.000
4	02	01	2.05	11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Purwakarta	25 Orang	Rp 532.050.000	PAD		25 Orang	50.000.000
4	02	01	2.06		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Purwakarta	90 %	Rp 1.083.868.400	PAD		90 %	500.000.000
4	02	01	2.06	01	Layanan Keuangan danKesejahteraan DPRD		Kab. Purwakarta	2 Paket		PAD		2 Paket	91,809,000
4	02	01	2.06	02	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Kab. Purwakarta	3 Paket	Rp 29.246.000.135	PAD		3 Paket	313,971,504
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Kab. Purwakarta	2 Paket	Rp 550.000.000	PAD		2 Paket	51,005,000
4	02	01	2.06	04	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Kab. Purwakarta	5 Paket	Rp 100.000.000	PAD		5 Paket	179,740,343

4	02	01	2.06	05	Layanan Administrasi DPRD		Kab. Purwakarta	2 Paket		PAD		2 Paket	153,015,000
4	02	01	2.06	06	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Kab. Purwakarta	5496 Dokumen	Rp 837.572.000	PAD		5496 Dokumen	83,648,200
4	02	01	2.06	08	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGASDAN FUNGSI DPRD**		Kab. Purwakarta	240 Laporan		PAD		240 Laporan	57.569.267.433
4	02	01	2.06	09	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Kab. Purwakarta	1182 Laporan		PAD		1182 Laporan	7.087.611.000
4	02	01	2.06	10	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Kab. Purwakarta	12 Dokumen	Rp 605.841.000	PAD		12 Dokumen	1200.000.000
4	02	01	2.07		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Kab. Purwakarta	90 %	Rp 6.492.370.000	PAD		90 %	9.500.000.000
4	02	01	2.07	02	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Kab. Purwakarta	2 unit	Rp 248.802.000	PAD		2 unit	200.000.000
4	02	01	2.07	05	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Kab. Purwakarta	3 unit	Rp 781.770.000	PAD		3 unit	1.050.000.000
4	02	01	2.07	06	Pembahasan KebijakanAnggaran		Kab. Purwakarta	1 unit		PAD		1 unit	1.750.000.000

4	02	01	2.07	11	Pembahasan KUA dan PPAS	"Jumlah Unit Saranadan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan"	Kab. Purwakarta	3 unit	Rp 354.733.000	PAD		3 unit	400.000.000
4	02	01	2.08		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Kab. Purwakarta	90 %	Rp 339.136.000	PAD		90 %	400.000.000
4	02	01	2.08	01	Pembahasan APBD	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"	Kab. Purwakarta	5 Laporan		PAD		5 Laporan	400.000.000
4	02	01	2.08	02	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Purwakarta	15 Laporan	Rp 340.673.000	PAD		15 Laporan	400.000.000
4	02	01	2.08	04	Pembahasan Laporan Semester	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purwakarta	12 Laporan	Rp 422.581.000	PAD		12 Laporan	400.000.000
4	02	01	2.09		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase unit barang milik daerah yang terpelihara	Kab. Purwakarta	90 %	Rp 326.013.000	PAD		90 %	400.000.000
4	02	01	2.09	01	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Purwakarta	7 unit	121.644.000	PAD		7 unit	400.000.000
4	02	01	2.09	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Purwakarta	15 unit	Rp 121.644.000	PAD		15 unit	100.000.000

4	02	01	2.07	11	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Kab. Purwakarta	3 unit	Rp 121.644.000	PAD		3 unit	100.000.000
4	02	01	2.08		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Kab. Purwakarta	90 %	Rp 121.644.000	PAD		90 %	100.000.000
4	02	01	2.08	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Kab. Purwakarta	5 Laporan	Rp 121.644.000	PAD		5 Laporan	100.000.000
4	02	01	2.08	02	Peningkatan KapasitasDPRD		Kab. Purwakarta	15 Laporan	579,600,000	PAD		15 Laporan	1.475,000,000
4	02	01	2.08	04	Pendalaman Tugas DPRD		Kab. Purwakarta	12 Laporan	800.000.000	PAD		12 Laporan	2000.000.000
4	02	01	2.09		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Kab. Purwakarta	90 %	570.000.000	PAD		90 %	525.000.000
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Kab. Purwakarta	7 unit	512.960.000	PAD		7 unit	450.000.000
4	02	01	2.09	02	Publikasi dan Dokumentasi DPRD		Kab. Purwakarta	15 unit	723.830.000	PAD		15 unit	500.000.000

4	02	01	2.07	11	Penyerapan dan Penghimpunan AspirasiMasyarakat		Kab. Purwakarta	3 unit	3.515.396.000	PAD		3 unit	4.500.000.000
4	02	01	2.08		Pelaksanaan Reses		Kab. Purwakarta	90 %	3.515.396.000	PAD		90 %	4.500.000.000
4	02	01	2.08	01	Fasilitasi Tugas DPRD		Kab. Purwakarta	6 Laporan	17.304.925.216	PAD		6 Laporan	12.231.452.216
4	02	01	2.08	02	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Kab. Purwakarta	6 Laporan	12.531.492.000	PAD		6 Laporan	8000.000.000
4	02	01	2.08	04	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Kab. Purwakarta	6 Laporan	1.531.452.216	PAD		6 Laporan	1.531.452.216
4	02	01	2.09		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Kab. Purwakarta	90 %	3.241.981.000	PAD		90 %	2.700.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan pada Setiap Semester (Semester I sampai Semester IV) sebagai bahan penyusunan KUPA- PPAS/R-APBDP Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029.

Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan melalui perencanaan kegiatan yang berkualitas. Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sekretariat DPRD Kota purwakarta pada tahun 2025 dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan dan mencapai perencanaan kegiatan berkualitas. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran kinerja yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2025-2029 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Sekretariat DPRD tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Bagian mengingat pewaktuan serta pencapaian indikator kinerja.
2. Renja Sekretariat DPRD tahun 2025, menjadi dasar bagi penyusunan perubahan RKAP/DPPA Sekretariat DPRD serta pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

Rencana Kerja tahun 2025 merupakan refleksi dari asumsi ketercapaian indikator kinerja dengan memperhatikan evaluasi

penganggaran tahun sebelumnya, guna mengantisipasi hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dapat diketahui asumsi-asumsi pencapaian keberhasilan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029.

Akhir kata, semoga Rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.